



Lelang Jabatan, Publik Harus Dilibatkan

JOGJA - Proses seleksi pengisian jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Jogja diminta bisa dilakukan secara transparan. Tak hanya melibatkan tim panitia seleksi (Pansel), tapi juga masukan dari masyarakat.

"Belajar dari kasus komisioner KPU Kota Jogja kemarin (yang diberhentikan karena kasus asusila), sebaiknya melibatkan masyarakat untuk tahu *track record* calon," kata Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba kemarin (28/4).

Dari laman resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja, ada 58 peserta yang mendaftar untuk mengisi 14 jabatan eselon II. Forpi meminta pansel untuk membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan rekam jejak dari 58 peserta tersebut. "Ini penting dilakukan agar orang-orang yang nantinya terpilih orang-orang yang punya integritas tinggi dan tidak bermasalah," katanya.

Pansel, lanjut dia, harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap semua proses seleksi yang dilakukan. Termasuk mempublikasikan semua tahapan seleksi.

Wali Kota juga diminta nantinya tidak melantik orang-orang yang bermasalah. Termasuk juga harus dipertimbangkan prestasi kerjanya bukan berdasar pada persoalan *like and dislike*. "Kami harap nilai akhir dari masing-masing peserta seleksi diumumkan ke publik melalui media massa," pesannya.

Sementara itu Plt Kepala BKPP Kota Jogja Sarwanto mengatakan, proses lelang jabatan saat ini masih berlangsung. Pihaknya menargetkan semua proses bisa selesai pada Mei nanti. (pra/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005